

# Pemberdayaan UMKM Berbasis Kearifan Lokal di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal Kepulauan Riau

Tasriani Tasriani\*<sup>1</sup>, Diana Eravia<sup>2</sup>, Fatimah Zuhra<sup>3</sup>, Dwi Cahyo Adi Putra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi UIN Sultan Syarif Kasim Riau

\*e-mail:[diana.eravia@uin-suska.ac.id](mailto:diana.eravia@uin-suska.ac.id)

## Abstract

*Community empowerment in the Frontier, Outermost, and Disadvantaged (3T) areas is one of the strategic efforts to encourage economic growth and community welfare in border areas. Through the Participatory Action Research (PAR) approach, this activity aims to increase the capacity of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) based on local wisdom in the border area of the Riau Islands. The PAR approach encourages active community involvement in formulating problems, designing solutions, and implementing programs in a participatory manner. This study focuses on the development of local potential, both in product and cultural aspects, as the main competitiveness of MSMEs in the border area of the Riau Islands. The results of the community development show that empowerment based on local wisdom is able to increase community income and strengthen local cultural identity.*

**Keywords:** Community empowerment, MSMEs, 3T Regions, Local wisdom, Participatory Action Research

## Abstrak

*Pemberdayaan masyarakat di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) merupakan salah satu upaya strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR), kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis kearifan lokal di wilayah perbatasan Kepulauan Riau. Pendekatan PAR mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam merumuskan masalah, merancang solusi, serta melaksanakan program secara partisipatif. Studi ini fokus pada pengembangan potensi lokal, baik dalam aspek produk maupun budaya, sebagai daya saing utama UMKM di wilayah perbatasan Kepulauan Riau. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis kearifan lokal mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat identitas budaya lokal.*

**Kata kunci:** Pemberdayaan masyarakat, UMKM, Daerah 3T, Kearifan lokal, Participatory Action Research

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Dunia. Dimana didalamnya memiliki lautan yang sangat luas, serta belasan ribuan pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke. Menurut Perpres (Perpres 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024), Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah. Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Dalam hal adanya pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah kabupaten; atau upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, menurut Perpres ini Presiden dapat menetapkan Daerah Tertinggal baru. Masalah yang terjadi di daerah perbatasan Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat beragam masalah terjadi di daerah perbatasan. Berbicara mengenai perbatasan, terdapat empat pihak yang terlibat, yakni pemerintah dua negara yang berbatasan dan rakyat dari dua negara yang tinggal di daerah perbatasan.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu dari beberapa Provinsi di Indonesia yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura yang memiliki perairan yang lebih banyak di bandingkan daratannya. Dari data yang di kutip Tribun di situs resmi Pemerintah provinsi Kepri diketahui 4 persen atau kurang lebih 10.595 km<sup>2</sup> merupakan daratan.

Sedangkan 96 persennya atau kurang lebih 241.215 km<sup>2</sup> terdiri dari lautan. (*Provinsi Kepri dalam angka 2021*).

Selama berabad-abad pulau terdepan tersebut dijadikan sebagai jalur perniagaan. Dan hal ini pada akhirnya mengalami perubahan dan pergeseran beberapakali. Namun satu hal yang tidak berubah adalah jalur niaga tersebut selalu melewati selat malaka atau menyusuri pulau-pulau terdepan yang ada di Kepulauan Riau. Sehingga menjadi penghubung utama (kawasan perbatasan) sekaligus urat nadi bagi kawasan di Asia Barat dan Asia Timur. Bahkan saat ini telah digunakan sebagai jalur utama perniagaan minyak dan gas.

Kepulauan Riau resmi memiliki 5 kabupaten dan 2 kota yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang. Disamping itu memiliki beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Potensi Provinsi Kepulauan Riau membuat beberapa wilayahnya dimasukkan ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Beberapa daerah di Kepulauan Riau seperti Batam, Bintan, dan Karimun tengah diupayakan sebagai pilot project pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan, dan Karimun diupayakan untuk bisa memaksimalkan potensi dalam bidang pariwisata dan juga industri.

Tabel 2. Luas Wilayah Kota Tanjungpinang dan Jumlah RT/RW

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW	Luas Wilayah Km <sup>2</sup>	
					Km <sup>2</sup>	(%)
1.	Bukit Bestari	5	41	177	69,00	29%
2.	Tanjung pinang Timur	5	53	215	83,50	35%
3.	Tanjungpinang Kota	4	30	77	52,50	22%
4.	Tanjungpinang Barat	4	42	204	34,50	14%
<b>Total Luas Wilayah Kota Tanjungpinang</b>		18	166	673	239,5	100%

*Sumber: Bappenas 2020*

Masalah-masalah yang masih terjadi di wilayah perbatasan di antaranya, infrastruktur pelayanan publik yang masih terbatas, rendahnya kualitas sumber daya manusia, sebaran penduduk yang tidak merata, ketergantungan masyarakat di perbatasan terhadap fasilitas publik dan kegiatan ekonomi di negara tetangga, dan sengketa tapal batas. Jika dikelompokkan berdasarkan isu, permasalahan-permasalahan perbatasan di Indonesia ini terdiri dari, isu batas teritorial yang belum disepakati di beberapa tapal batas dengan negara tetangga, isu keamanan dan kedaulatan nasional, seperti kejahatan lintas batas dan terorganisir, seperti penyelundupan, perdagangan ilegal dan garis batas yang kabur. Isu lingkungan misalnya kerusakan ekologi dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, baik bersifat legal maupun illegal, isu kemiskinan, keterbelakangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang dialami warga Indonesia di perbatasan.

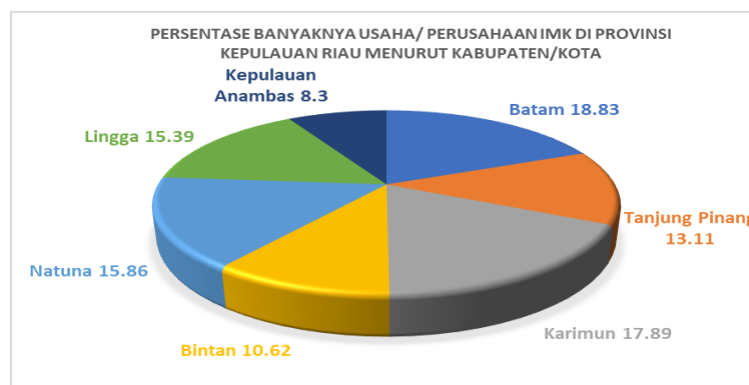
Persoalan ekonomi yang dialami oleh masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan menjadi permasalahan utama karna ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya yang ada akibat dari tingkat pendidikan yang masih rendah. Realitasnya kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan dan sering diidentikkan dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah (Nasution dan Badarudin 2005). Untuk itu program pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan keniscayaan bagi pembangunan sumber daya pesisir secara komprehensif (Sursiyamtini, Dkk 2012). Salah satu gagasan proses pemberdayaan adalah melalui pengembangan sumber daya manusia yang mampu mengelola sumberdaya lingkungan pesisir dan laut.

Di sisi lain juga hasil tangkapan dari UMKM berupa nelayan pesisir yang merupakan sumber utama penghasilan dijual bukan kepada konsumen langsung tapi kepada tengkulak (penampung) atau kepada nelayan lain yang kondisinya ekonominya lebih baik (penampungan ikan), yang mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pedagang ikan dan rentenir. Nelayan harus menjual ikannya

dengan harga yang sangat murah sebagai kompensasi pinjaman yang telah diberikan kepada nelayan. Kondisi ini sangat menjerat para nelayan, yang mau tidak mau harus dijalani demi kelangsungan kehidupan ekonomi keluarganya serta di sisi lain mereka harus membayar hutang pinjaman yang cukup tinggi untuk biaya melaut dan biaya hidup keluarganya.

Upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya melibatkan intervensi dari luar, tetapi melibatkan pula potensi dan sumber daya masyarakat yang mungkin untuk dikembangkan. Upaya pemberdayaan haruslah responsif terhadap permasalahan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain bahwa upaya pemberdayaan dapat dirancang dengan baik apabila didukung oleh data dan informasi yang akurat tentang kondisi obyektif suatu masyarakat. Termasuk pada kawasan perbatasan, khususnya para pengusaha UMKM yang tercatat hingga tahun 2022.

Dari hasil Survei IMK (Industri Mikro dan Kecil) 2020 Tahunan tercatat bahwasaha/perusahaan IMK yang terbanyak berada di Kota Batam dengan 2.595 usaha (18,83 persen). Hal ini menjadikan Kota Batam ini sebagai lokasi strategis pertumbuhan usaha/perusahaan IMK. Selanjutnya, Kabupaten yang memiliki jumlah usaha IMK tertinggi kedua adalah Kabupaten Karimun sebanyak 2.465 usaha (17,89 persen), Kabupaten Natuna sebanyak 2.185 usaha (15,86 persen), Kabupaten Lingga sebanyak 2.120 usaha (15,39 persen), Kota Tanjungpinang sebanyak 1.806 usaha (13,11 persen), dan Kabupaten Bintan sebanyak 1.464 usaha (10,62 persen). Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki jumlah usaha/perusahaan IMK terendah sebanyak 1.144 usaha (8,30 persen) dan hal ini ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Persentase Banyaknya Usaha IMK di Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota  
Sumber: (<https://kepri.bps.go.id>)

Sementara berdasarkan data yang di dapat dari BPS Kota Tanjungpinang maka data IMK kota Tanjungpinang terlampir pada tabel di bawah ini. Dari tabel di bawah ini maka IMK kota Tanjungpinang semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan tahun 2018 sebesar 616 IMK, tahun 2019 sebesar 3.845 IMK dan tahun 2022 jumlah IMK sebesar 4.080 IMK.

**Tabel 3. Data Industri Mikro dan Kecil (IMK) Tanjungpinang Tahun 2018-2020**

	Kecamatan	Industri Mikro dan Kecil (IMK)		
		2018	2019	2020
1.	Bukit Bestari	189	1.118	1.171
2.	Tanjung pinang Timur	230	977	1.110
3.	Tanjungpinang Kota	146	938	955
4.	Tanjungpinang Barat	51	812	844
	Total	616	3.845	4.080

Sumber: <https://tanjungpinangkota.bps.go.id/> 2022.

Dari data yang telah dijelaskan di atas diketahui bahwa Kepulauan Riau merupakan kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah pesisir. Wilayah pesisir diperbatasan adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat dengan karakteristik keluarga yang khas. Masyarakat di daerah pesisir sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Dimana profesi sebagai nelayan identik dengan masalah kemiskinan, yang sampai saat ini masih menjadi fenomena masyarakat pesisir. Menurut (Sugiyanto, 2010) menegaskan bahwa kemiskinan nelayan diakibatkan oleh beberapa faktor terutama faktor internal yaitu keterbatasan kualitas sumber daya manusia (nelayan), keterbatasan teknologi penangkapan ikan di laut dan nelayan yang kurang harmonis, ketergantungan pada musim melaut, dan gaya hidup atau perilaku konsumtif nelayan.

Berdasarkan kajian terhadap kondisi diatas awal yang terjadi pada pelaku UMKM di Kepulauan Riau, serta kajian terhadap beberapa pengabdian masyarakat yang relevan, maka nilai kebaruan (novelty) pada pengabdian dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat UMKM Daerah 3T (Terdepan, Terluar Dan Tertinggal) Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus di daerah Perbatasan Kepulauan Riau) melalui metode *Participatory Action Research*. Dasar argument ini yang menjadikan topik penelitian pengabdian ini dirasa perlu dan penting untuk dilakukan.

## 2. METODE

Secara metodologis pengabdian ini dengan menggunakan pendekatan *participatory action Reaseach* (PAR). Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat, mendengar, sekaligus memahami gejala sosial yang ada dimasyarakat. Dalam teknik PAR, cara pandang perencana atau pembuat program kegiatan memandang 'masyarakat' atau 'kelompok sasaran' sebagai 'subjek' bukan objek kegiatan serta pendamping masyarakat kelompok sasaran menempatkan posisi sebagai 'insider' (orang atau pihak yang berada didalam kelompok sasaran dan turut aktif didalam program kegiatan) bukan sebagai 'outsider' (orang atau pihak yang berada diluar kelompok sasaran) (Reason, 2008). penelitian yang melibatkan semua pihak yang relevan dalam meneliti secara aktif bersama-sama untuk menyusun, mengambil tindakan, mencatat implikasi tindakan tersebut. Riset ini berorientasi pada upaya memfasilitasi masyarakat untuk mengemangkan diri dan menyelesaikan persoalan kontekstual yang berkembang.

Tujuan akhir dari dilakukan kegiatan perencanaan, pengabdian atau pengembangan dengan menggunakan PAR adalah upaya-upaya pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Ciri khas sosial-budaya atau sosial-ekonomi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu, perlu untuk dikenali, dipahami serta diakomodasikan kebutuhan atau keinginannya, sehingga hasil perencanaan yang dilakukan dapat lebih adaptif dan akomodatif.

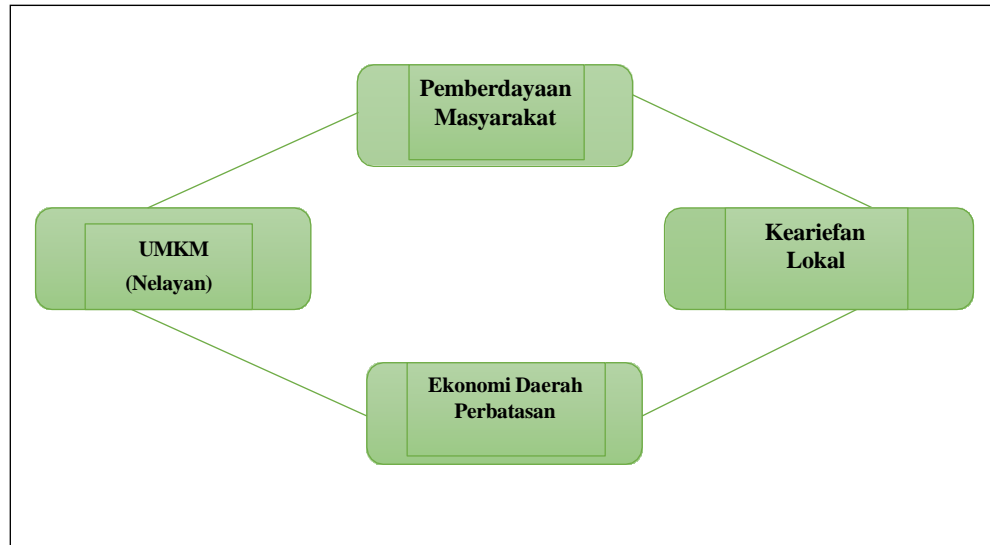
Bickman, Rifkin, dan (Shresta,1989) mengatakan, ada beberapa indikator sebagai suatu basis untuk menjelaskan suatu metodologi yang berkembang untuk mengukur partisipasi daripada kegiatan. Indikator-indikator kualitatif dari partisipasi tersebut, antara lain (Jim Iffe 2008): adanya suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi; adanya peningkatan pengetahuan masyarakat; adanya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan; dan adanya peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi.

Adapun tahapan metode PAR ini antara lain:

- a. Mengidentifikasi problematika yang ada.
- b. Menemukan dan mengenali faktor penyebab persoalan dan mencari alternatif solusinya.
- c. Menyusun strategi dan metode yang tepat untuk memecahkan permasalahan.
- d. Menyusun rencana aksi berdasarkan prioritas, dan keberlanjutan program melalui tahapan-tahapan hingga mencapai target yang diharapkan.

Adapun kerangka pemikiran akan memberikan manfaat berupa persepsi yang sama antara peneliti dan pembaca terhadap jalur pemikiran penelitian pengabdian. Berdasarkan pengabdian Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat UMKM Daerah 3T (Terdepan, Terluar Dan Tertinggal)

Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus di daerah Perbatasan Kepulauan Riau) melalui metode PAR, maka dapat dirumuskan kerangka berfikirnya seperti tampak pada gambar dibawah ini:



Sumber: Pengolahan Peneliti, 2023

### Gambar 5. Kerangka Berfikir Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan gambar di atas maka kerangka berfikir dari kegiatan pengabdian Masyarakat ini adalah dengan tujuan utama adalah melakukan pemberdayaan kepada Masyarakat khususnya masyarakat nelayan pesisir Desa Tanjung Sebauk, Desa Malang Rapat, dan Desa Teluk Bakau. Kegiatan pemberdayaan ini didasarkan pada kearifan lokal mengingat Masyarakat pesisir daerah tersebut masih tetap mempertahankan alat tangkap tradisional yang ramah lingkungan. Selain itu setelah melakukan pemberdayaan maka pendampingan dalam menciptakan produk yang bersertifikat halal juga dilakukan oleh tim pengabdian sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi Masyarakat perbatasan dan pesisir khususnya Masyarakat UMKM

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengabdian ini berada di Kepulauan Bintan daerah pesisir perbatasnya Desa Tanjung Sebauk, Desa Malang Rapat, dan Desa Teluk Bakau, desa tersebut dijadikan destinasi pariwisata di Kepulauan Riau. Infrastruktur daerah pesisir ditata dan dilengkapi untuk menunjang kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke sana, sesuai dengan (Agita, 2020) daerah perbatasan dengan pendekatan pariwisata. Upaya pemerintah membangun hingga wilayah perbatasan sangat bagus demi melakukan pemerataan pembangunan secara nasional di samping sebagai batas penghubung untuk UMKM berkembang.

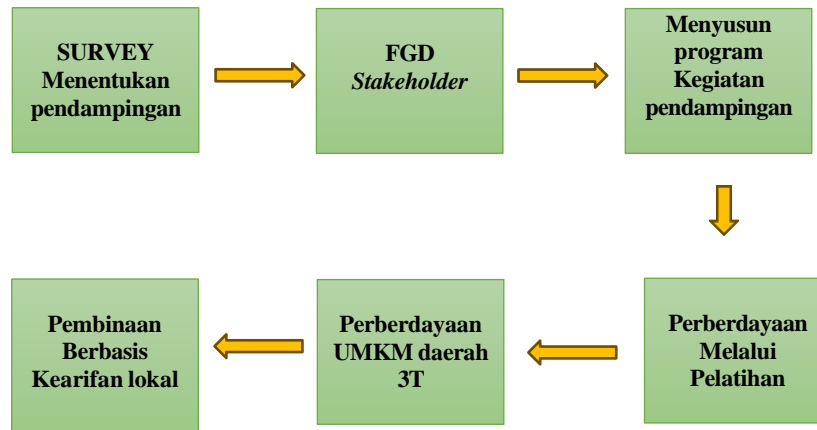
Adapun Langkah-langkah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut diantaranya:

1. Perencanaan (*plan*)  
Perencanaan ini dilakukan setelah memperhatikan kondisi masyarakat nelayan pesisir perbatasan. Penencanaan ini meliputi strategi dan metode dalam memecahkan problematika yang dihadapi oleh nelayan pesisir perbatasan.
2. Tindakan (*action*)  
Setelah proses perencanaan dilakukan, nelayan pesisir perbatasan mengimplementasikan rencana yang telah dibuat tersebut dengan dibantu dan difasilitasi oleh peneliti.
3. Pengamatan (*observe*)  
Pengamatan dilakukan untuk memperhatikan dan menganalisis keberhasilan, kelemahan, dan kekurangan strategi dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan problematika dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM pada nelayan pesisir perbatasan. Demikian

pula faktor-faktor pendukung dan penghambat yang teridentifikasi selama kegiatan berlangsung.

4. Refleksi (*reflect*)

**Gambar 6. Alur Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pengabdian Masyarakat**



Sumber: Pengolahan Data Peneliti, 2023

Usaha-usaha yang telah dilakukan dalam memecahkan problematika UMKM pada nelayan pesisir perbatasan tersebut direfleksikan dan dievaluasi, baik kekurangan, kelemahan, dan keberhasilan strategi dan metode dalam memecahkan problematika tersebut. Refleksi dan evaluasi ini berujung kepada perencanaan (*plan*) seperti pada poin pertama untuk menuntaskan problematika nelayan pesisir, sehingga tercapai sesuai dengan harapan.

Strategi yang digunakan dalam PAR diatas, maka bentuk kegiatan dapat dilakukan dalam penelitian action research ini adalah:

- Focus Group Discussion (FGD) untuk untuk mengakomodir kebutuhan dan permasalahan nelayan pesisir perbatasan.
- Workshop penyusunan program kegiatan berdasarkan hasil FGD.
- Penyusunan materi pendampingan nelayan pesisir perbatasan di daerah 3T
- Pelatihan berdasarkan program kegiatan yang telah ditetapkan.
- Pembinaan nelayan pesisir perbatasan berbasis kearifan lokal.
- Pendampingan nelayan pesisir hingga terwujudnya UKMM mandiri untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Seluruh proses dan siklus kegiatan dilakukan oleh subyek penelitian & peneliti, diobservasi, dimonitoring dan dievaluasi.

Adapun alur yang akan dilakukan pada kegiatan pendampingan kegiatan pengabdian Masyarakat adalah melakukan survei terkait masalah yang sesungguhnya terjadi pada Masyarakat nelayan pesisir. Setelah melakukan survei maka tim pengabdian Masyarakat melakukan FGD dengan beberapa *stakeholder* terkait. Tim pengabdian telah mendapatkan rangkaian permasalahan yang terjadi di lapangan selanjutnya adalah Menyusun program kegiatan pendampingan yang akan dilakukan.

Program pemberdayaan yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pelatihan dalam menciptakan produk tangkapan yang bersertifikat halal dari MUI Kota Tanjungpinang. Hal ini tentunya melibatkan Masyarakat nelayan pesisir yang memiliki tangkapan yang diharapkan nantinya mereka dapat melakukan proses penjualan secara mandiri tanpa melalui agen (Tengkulak/Toke dalam bahasa melayu) sehingga harapannya dapat meningkatkan pendapatan UMKM Masyarakat nelayan pesisir.

## Kegiatan Pengabdian

### a. Program Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan desain aksi yang telah disusun maka rencana program pengabdian Masyarakat yang dilakukan adalah Program pemberdayaan Masyarakat UMKM nelayan pesisir melalui pendampingan tentang mempertahankan kearifan lokal. Setelah itu program selanjutnya adalah pendampingan dalam menciptakan produk yang bersertifikat halal dalam kemasannya dari MUI kota Tanjung Pinang. Dan program yang terakhir adalah melakukan pelatihan tentang praktek pemasaran produk yang berlabel halal secara langsung.

### b. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Masyarakat

Pada tahapan identifikasi masalah tim peneliti telah melakukan beberapa rangkaian persiapan sebelum terjun langsung ke lapangan dengan tujuan untuk melihat kebutuhan dasar dari Masyarakat setempat. Peneliti melakukan pengumpulan data-data tentang kondisi masyarakat nelayan pesisir yang berada di Desa Tanjung Sebauk Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang, Kampung Sungai Angus Desa Malang Rapat dan Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM berbasis kearifan lokal di daerah perbatasan.

Setelah melakukan identifikasi maka ditemukan beberapa masalah Masyarakat pesisir yang pertama kurang pahamnya masyarakat terkait pentingnya labelisasi halal dari hasil tangkapan ikan dan produk yang dihasilkan. Selain itu ikan segar yang didapat dari hasil tangkapan juga dijual ke rumah makan atau tempat nestinisi wisata kuliner. Namun yang menjadi permasalahan rata-rata pemilik restoran non-muslim yang kondisi dan situasi tempat pengolahan makanan masih terlihat jauh dari kondisi halal (terlihat hewan anjing berkeliaran). Oleh karena itu pentingnya pendampingan sertifikat halal tidak hanya ditujukan kepada Masyarakat nelayan namun juga pelaku usaha dan UMKM daerah bintan dan tanjungpinang.

Permasalahan yang kedua Masyarakat selalu menjual hasil tangkapannya kepada pihak ketiga (Toke/ Tengkulak dalam Bahasa melayu). Sehingga dengan kegiatan sosialisasi diharapkan masyarakat nelayan pesisir mampu melakukan pemasaran secara mandiri sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat pesisir.

### c. Pengumpulan Data Dan Informasi

Pada tahap berikutnya, peneliti mengumpulkan data melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang diikuti oleh *stakeholders* Desa Tanjung Sebauk Kelurahan Senggarang Kota Tanjungpinang, Kampung Sungai Angus Desa Malang Rapat dan Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan yang terdiri dari: Ketua Rukun Tetangga, Ketua Koperasi, Warga, Pegawai dan Penyuluh dinas Perikanan Provinsi Kepri dan Tokoh Masyarakat pesisir perbatasan.



Sumber: Pengolahan Data Peneliti, 2023

**Gambar 7. Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh stakeholders desa**

Data-data yang dikumpulkan melalui FGD ini berupa identifikasi masalah berupa; *Pertama*, isu-isu kritis di daerah pesisir perbatasan; *Kedua*, sulit pemasaran produktivitas pedesaan khususnya masyarakat nelayan berbasis kearifan lokal tentang alternatif-alternatif solusi sesuai dengan isu-isu daerah pesisir perbatasan; *Ketiga*, bentuk-bentuk kegiatan yang diharapkan dapat terciptanya pemasaran produk UMKM yang bersertifikat halal dalam kemasannya.

#### d. Melakukan Konsultasi Dengan Pihak Terkait

Sebelum terjun langsung ke nelayan pesisir maka Tim Pengabdian Masyarakat melakukan konsultasi dengan dinas terkait yaitu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Tim Pengabdian Masyarakat mendatangi langsung Pos Pengawasan SATKER Dinas Kelautan dan Perikanan yang berada di Jalan Datuk Idris, Dompok Kecamatan Bukit Barisan Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau. Kegiatan konsultasi ini berguna untuk mendalami lebih jauh tentang kondisi masyarakat dan nelayan pesisir. Selain itu dengan melakukan konsultasi ini maka tim peneliti juga bisa mengetahui wilayah mana yang sebaiknya dikunjungi untuk melakukan kegiatan pengabdian.



Sumber: Pengolahan Data Peneliti, 2023

**Gambar 8. Konsultasi Dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau**

Setelah berkonsultasi maka Tim dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tim yang mendampingi adalah para penyuluh yang biasanya bertugas untuk menyuluh dan mendampingi para nelayan. Selain itu tempat pengabdian juga telah di konsultasi kepada dinas. Setelah melihat data dari dinas maka tempat pengabdian masyarakat dilakukan di tiga desa yaitu, Desa Tanjung Sebauk, Desa Malang Rapat, dan Desa Teluk Bakau.

#### e. Pelaksanan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pertama adalah melakukan pendampingan dalam menerapkan dan mempertahankan proses tangkap berdasarkan kearifan lokal. Hal ini dilakukan langsung oleh tim pengabdian Masyarakat dengan masyarakat nelayan pesisir. Selanjutnya dengan melakukan pendampingan dalam menciptakan produk yang bersertifikat halal dalam kemasannya dari MUI kota Tanjungpinang. Dan program yang terakhir adalah melakukan pelatihan tentang praktek pemasaran produk yang berlabel halal secara langsung.

Kegiatan pengabdian pertama dilakukan di desa Tanjung Sebauk Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota Tanjungpinang dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Masyarakat nelayan pesisir cukup antusias mengikuti dan berpartisipasi aktif kegiatan pengabdian masyarakat ini.



Sumber: Pengolahan Data Peneliti, 2023

**Gambar 9. Pendampingan pada UMKM para nelayan disarankan kemasan yang bersertifikat Halal**

Kegiatan pengabdian selanjutnya dilakukan di Kampung Sungai Angus Desa Malang Rapat dan Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Kegiatan pendampingan dilakukan Tim Pengabdian Masyarakat dengan langsung mendatangi para nelayan yang sedang berkerja di pesisir Pantai. Hal ini dilakukan karena sulitnya mengumpulkan para neleyen yang sedang bekerja atau melaut.



Sumber: Pengolahan Data Peneliti, 2023

**Gambar 11: Kegiatan PKM di Kampung Sungai Angus Desa Malang Rapat dan Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan PAR (*Participatory Action Research*), berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan UMKM. Melalui pemberdayaan berbasis kearifan lokal, UMKM mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pasar lokal maupun global. Beberapa hasil yang dicapai meliputi:

1. Pengembangan Produk Berbasis Kearifan Lokal:  
UMKM setempat mulai memproduksi kerajinan tangan, makanan olahan, dan produk lain yang memanfaatkan sumber daya alam lokal. Produk ini mengusung identitas budaya yang kuat, seperti motif-motif tradisional dalam kerajinan atau resep makanan khas daerah, seperti ikan kering atau ikan asin, kerupuk ikan dll.
2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat:  
Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat mampu mengelola usaha dengan lebih baik. Mereka tidak hanya belajar tentang produksi, tetapi juga manajemen, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
3. Pemasaran dan Branding:  
Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) adalah keterbatasan akses ke pasar. Melalui pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) masyarakat diberikan pelatihan tentang cara memasarkan produk secara

digital, membuat branding yang menarik, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi.

4. Terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUR): sebagai bentuk kolaborasi antar pelaku usaha sehingga menghasilkan produk yang mempertahankan kearifan lokal dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi UMKM di daerah perbatasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

#### 4. KESIMPULAN

PAR (*Participatory Action Research*) terbukti sebagai pendekatan yang efektif dalam pemberdayaan masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Melalui keterlibatan aktif masyarakat dan pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal, pengabdian masyarakat ini menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat serta penguatan identitas budaya lokal. Upaya ini diharapkan dapat menjadi model bagi pemberdayaan masyarakat di wilayah-wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan tradisi setempat khususnya di daerah perbatasan Kepulauan Riau. Kunci keberhasilan terletak pada keterlibatan aktif komunitas dalam semua tahapan proses. Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pengabdian ini mampu meningkatkan kapasitas ekonomi lokal secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor seperti pemerintah dan aparat desa, perguruan tinggi, dan pelaku usaha besar sangat disarankan untuk memperkuat ekosistem UMKM di wilayah perbatasan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan Dinas Perikanan serta masyarakat perbatasan Kepulauan Riau atas kerja sama dan dukungan penuh selama pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif, serta kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan pendanaan dan fasilitas pendukung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Irfan, A., Febria, D., et al. (2024). PAR: Peningkatan Potensi Ekonomi Itak Kalamai Produk Khas Masyarakat Pujud. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Qomar, M. N., et al. (2022). Peningkatan Kualitas UMKM Berbasis Digital dengan Metode Participatory Action Research (PAR). *Community Development Journal*, 3(1), 74–81.
- Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.). (2008). *The Sage handbook of action research: Participative inquiry and practice\** (2nd ed.). Sage.
- Satriadi, S., Fauzar, S., & Gizta, A. D. (2024). Pembinaan Kemandirian Usaha Mikro Masyarakat Desa Malang Rapat Pesisir Bintan. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://ejournal.sttdumai.ac.id/index.php/abdine/article/view/448>
- Salim, M., et al. (2024). Kolaborasi Peningkatan Kualitas UMKM Berbasis Digital Marketing dengan Metode PAR. *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.
- Sugiyanto, C., & Adhuri, D. S. (2010). Nelayan tradisional dan kemiskinan: Studi kasus di pesisir Jawa Tengah. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 31\*(2), 123–135.
- U.S. Census Bureau. (2000). *State and Country QuickFacts*. Washington, D.C.: United States Bureau of the Census. Retrieved November 7, 2008, from <http://quickfacts.census.gov/qfd/>